

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM PERSPEKTIF *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR*

Tim Peneliti:

Ketua : Yoremia Lestari br.Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 0021028502

Anggota 1 : M. Abadan Syakura, S.E.,M.SA
NIDN. 0007128902

Anggota 2 : Dwi Risma Deviyanti.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS
NIDN. 0018107001

Anggota 3 : Norita Ayu Ningsih
NIM. 150103503

Anggota 4 : Anggreliia Anugerah
NIM. 1501035201

Anggota 5 : Erina Sasmita
NIM. 1501035153

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN JURUSAN AKUNTANSI

Judul Penelitian : **Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam
Perspektif *Theory of Planned Behavior***

Tim Peneliti

Ketua	: Yoremia Lestari br.Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CA
Anggota 1	: M. Abadan Syakura, S.E.,M.SA
Anggota 2	: Dwi Risma Deviyanti.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS
Anggota 3	: Norita Ayu Ningsih
Anggota 4	: Anggreliia Anugerah
Anggota 5	: Erina Sasmita

Sumber Dana : PNBK Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Besar Dana Penelitian : Rp20.000.000,00

Samarinda, 30 September 2021

Ketua Jurusan Akuntansi,

Ketua Tim Penelitian,

Dwi Risma Deviyanti, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP 197010181995122001

Yoremia Lestari Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIP 198502212014042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah.,M.Si
NIP 196205131988112001

ABSTRACT

One of the local taxes in Penajam Paser Utara Regency is considered as the swallow nest tax, which is a potential regional tax contributor as the selling price of swallow nest per kilogram reaches tens of millions. However, the actualization of the tax revenue did not reach the planned budget target because most villages in this area do not pay taxes. This study discusses the cause of the non-compliance taxpayers of the swallow nest tax. Further, this research utilizes the Theory of Planned Behavior perspective conducted with qualitative approach. This research was conducted in Babulu Laut village in Penajam Paser Utara involving the owners and the tax collectors of swallow nest s as the informants. The results of this study indicated that the taxpayers' incompliance was due to several reasons, including: high tax rate, agreement among association members, and enforcement from local government. In sum, this study illustrates the importance of incorporating the behavior of taxpayers' comprising beliefs, attitudes, and norms in achieving optimum taxpayers' compliance.

The research are going to present in Mulawarman International Conference on Economics and Business (MICEB) 2021 then will be published in international journal.

Keywords: *Swallow Nest Tax, Theory of Planned Behavior, Qualitative research*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
IDENTITAS PENGUSUL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kontribusi Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Theory of Planned Behavior	5
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak	7
2.3. Pajak Sarang Burung Walet.....	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1 Jenis Penelitian.....	10
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
3.3 Informan Penelitian.....	11
3.4 Teknik Analisis Data.....	12
3.5 Kerangka Pikir Penelitian	12
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet.....	14
4.2 Model Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.....	18
4.3 Peran Sanksi Pajak.....	18
BAB V PENUTUP	20
5.1 Simpulan	20
5.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Theory of Plan Behavior (TPB).....	5
Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Luaran Penelitian
Lampiran 2	Lembar Penilaian Proposal
Lampiran 3	Lembar Penilaian Hasil Penelitian
Lampiran 4	Kontrak Penelitian

IDENTITAS PENGUSUL

a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN : 0021028502
2. Nama Peneliti : Yoremia Lestari br Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CA
3. Pangkat dan Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ Asisten Ahli
4. ID SINTA : Yoremia Lestari
5. ID Research Gate : Yoremia Lestari
6. ID Google Scholar : Yoremia Lestari

b. Identitas Anggota

1. NIDN : 0007128902
2. Nama Peneliti : Muhammad Abadan Syakura, S.E., M.SA., Ak., CSRS
3. Pangkat dan Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ Asisten Ahli
4. ID SINTA : Muhammad Abadan Syakura
5. ID Research Gate : Muhammad Abadan Syakura
6. ID Google Scholar : Muhammad Abadan Syakura

c. Identitas Anggota

1. NIDN : 018107001
2. Nama Peneliti : Dwi Risma Deviyanti.,SE.,M.Si.,Ak.,CA
3. Pangkat dan Jabatan : Pembina/Lektor Kepala
4. ID SINTA : Dwi Risma Deviyanti
5. ID Research Gate : Dwi Risma Deviyanti
6. ID Google Scholar : Dwi Risma Deviyanti

d. Identitas Anggota

1. NIM : 150103503
2. Nama Peneliti : Norita Ayu Ningsih

e. Identitas Anggota

1. NIM : 1501035201
2. Nama Peneliti : Anggrelika Anugerah

f. Identitas Anggota

1. NIM : 1501035153
2. Nama Peneliti : Erina Sasmita

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal memberikan peluang kepada setiap daerah untuk dapat memungut dan mengelola pajak sesuai potensi yang ada di daerah tersebut. Salah satu jenis pajak daerah yang sedang dimaksimalkan adalah pajak sarang burung walet. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet memiliki potensi cukup besar sebab pangsa pasar di dunia Internasional cukup menjanjikan. Hal ini karena Indonesia menjadi Negara eksportir terbesar sarang burung walet ke China dengan pangsa pasar 75% di dunia.

Berbicara tentang pajak, menurut penggolongan atas lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan unit vertikal dibawahnya. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah guna membiayai keperluan belanja daerah dan pembangunan infrastruktur. Pajak pusat memiliki beberapa jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain. Kemudian untuk pajak daerah dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kota atau kabupaten.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, jenis pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah otonom, tentunya telah menerapkan pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi besar pada kabupaten ini adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan penyumbang pajak daerah yang cukup potensial karena harga jual sarang burung walet per kilogramnya mencapai puluhan juta. Pajak ini pun

telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2011.

Pemerintah kabupaten menilai bahwa keuntungan yang diambil dari pajak sarang burung walet sangat besar. Akan tetapi, dari tahun 2014-2019 realisasi penerimaan pajak dari sektor ini tidak sesuai dengan target anggaran. Dapat dilihat pada tabel 1 tentang Wajib Pajak, Target Anggaran dan Realisasi Anggaran Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 1. Wajib Pajak Target Anggaran dan Realisasi Anggaran Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Tahun	Wajib Pajak Sarang Burung Walet di PPU	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	2014	10 orang	Rp30.000.000,00	Rp18.125.000,00
2.	2015	20 orang	Rp75.000.000,00	Rp37.058.010,00
3.	2016	33 orang	Rp50.000.000,00	Rp54.977.378,00
4.	2017	25 orang	Rp50.000.000,00	Rp54.176.500,00
5.	2018	26 orang	Rp50.000.000,00	Rp80.370.000,00
6.	2019	23 orang	Rp98.500.000,00	Rp95.461.000,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (data diolah)

Pada tabel.1 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak sarang burung walet untuk kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Dalam hal realisasi, penerimaan pajak sarang burung walet mengalami peningkatan meskipun jumlah wajib pajak berkurang. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya sesuai dengan penghasilan dari sarang burung walet. Akan tetapi dari semua wajib pajak yang terdata, ada beberapa desa yang tidak melaporkan pajak sarang burung waletnya salah satunya yaitu desa Babulu Laut.

Desa Babulu Laut merupakan desa yang terletak di kecamatan Babulu dan berdampingan dengan desa Babulu Darat. Sepanjang jalan desa banyak ditemukan bangunan sarang burung walet. Berdasarkan data dari kantor desa Babulu Laut bahwa ada 219 orang pemilik sarang burung walet, namun belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak pengusaha sarang burung walet.

Permasalahan di atas ada kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu, (2013) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan

hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilandasi oleh niat dan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak sarang burung walet akan dianalisis dari perspektif *Theory of Planned Behavior*. Berdasarkan model TPB dari Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku taat atau tidak. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor pertama adalah sikap, yaitu suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Kedua adalah norma subjektif yang didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan suatu perilaku. Ketiga adalah *Perceived Behavior Control* atau kontrol keyakinan adalah keyakinan individu terhadap hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi seberapa kuat hal ini mempengaruhi perilaku (Ajzen, 2005).

Menurut Hidayat dan Nugroho (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat untuk tidak patuh pajak. Artinya bahwa semakin kecil niat seseorang untuk tidak patuh pajak, akan semakin kecil pula kemungkinan orang tersebut untuk berperilaku tidak patuh. Kemudian Syakura & Ginting, (2017) juga berpendapat sama bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh niat menggunakan serta niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh pengetahuan pajak dan kepuasan wajib pajak. Selain itu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara tidak langsung oleh pengetahuan pajak dan kepuasan wajib pajak melalui niat. Syakura, Khairin, Ginting, Kusumawardani, & Fitria, (2016) juga menemukan bahwa secara keseluruhan, informan penelitian menunjukkan perilaku tidak patuh yang ditunjukkan dengan perilaku *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Sama seperti model TPB menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap faktor-faktor perilaku seperti kurangnya moral pajak dan keadilan sistem perpajakan. Temuan selanjutnya bersifat subyektif faktor-faktor norma seperti pengaruh lingkungan sosial di sekitar wajib pajak (orang atau sistem pajak). Selanjutnya yang terakhir adalah faktor kontrol perilaku yang dirasakan seperti kemungkinan audit pajak yang rendah dan pengawasan otoritas pajak yang lemah.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan menggunakan model *Theory of planned behavior* dengan pendekatan kuantitatif,

namun penelitian kepatuhan perpajakan berpotensi untuk terus dikembangkan. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian baru dikarenakan masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi tentang pemungutan pajak sarang burung walet dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* dengan menggunakan metode wawancara dan pendekatan fenomenologi. Urgensi penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya kepala desa Babulu Laut Kabupaten Panajam Paser Utara dalam merumuskan suatu kebijakan terkait pajak sarang burung walet untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha sarang burung walet.

1.2 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

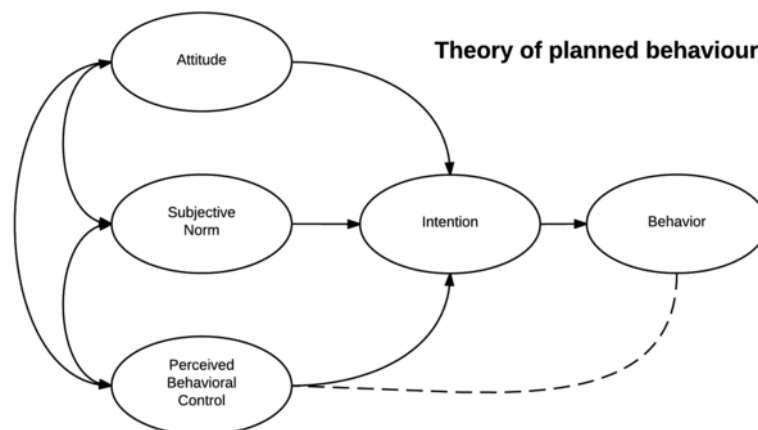
Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut “Apa yang menyebabkan munculnya perilaku ketidakpatuhan wajib pajak sarang burung walet di Desa Babulu Laut dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*?”.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah ketidakpatuhan wajib pajak sarang burung walet di Desa Babulu Laut dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*. Penelitian ini memiliki kontribusi baik teoritis maupun praktik. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah mengenai *Theory of Planned Behavior* pada aspek perpajakan. Sedangkan secara praktik, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung dalam usaha sarang burung walet. Kemudian dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk memprediksi perilaku individu. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori yang dikembangkan oleh Ajzen merupakan penyempurnaan dari *reason action theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari *theory of planned behavior* ini sama seperti teori *reason action* yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Namun dalam *theory of planned behavior* Ajzen menambahkan satu faktor yang menentukan intensi yaitu *perceived behavioral control*. *Perceived behavioral control* merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu (Ajzen, 2005).



Gambar 2.1 Model *Theory of Plan Behavior*

Sumber : Azjen (1991)

Berdasarkan model TPB Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku taat atau tidak. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah sikap (*attitude*), yaitu suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Dalam hal ini warga desa Babulu Laut merespon secara negatif adanya peraturan pajak sarang burung walet ini. Kedua adalah norma subjektif (*subjective*

norm) yang didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Tekanan sosial berasal dari keluarga, teman, lingkungan sekitar dan lain-lain. Lingkungan sekitar di desa Babulu Laut, warganya tidak ada yang membayar pajak sarang burung walet. Ketiga adalah *perceived behavior control* yaitu persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu (Ajzen, 2005) seperti penerapan sanksi pada warga yang tidak membayar pajak. Kemudian hasil dari tiga faktor diatas menyimpulkan niat warga desa Babulu Laut untuk tidak membayar pajak sehingga menciptakan perilaku tidak patuh.

2.1.1. Intensi

Menurut Ajzen (2005) intensi merupakan anteseden dari sebuah perilaku yang nampak. Intensi dapat meramalkan secara akurat berbagai kecenderungan perilaku. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, intensi adalah fungsi dari tiga penentu utama, pertama adalah faktor personal dari individu tersebut, kedua bagaimana pengaruh sosial, dan ketiga berkaitan dengan kontrol yang dimiliki individu (Ajzen, 2005). Berdasarkan uraian diatas pengertian intensi pada penelitian ini adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu baik secara sadar atau tidak.

2.1.2. Sikap (*Attitude*)

Ajzen (2005) mengatakan sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh *belief* tentang konsekuensi dari sebuah perilaku, yang disebut sebagai *behavioral beliefs* (Ajzen, 2005). Menurut Ajzen (2005) setiap *behavioral beliefs* menghubungkan perilaku dengan hasil yang bisa didapat dari perilaku tersebut. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh evaluasi individu mengenai hasil yang berhubungan dengan perilaku dan dengan kekuatan hubungan dari kedua hal tersebut (Ajzen, 2005).

Secara umum, semakin individu memiliki evaluasi bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif maka individu akan cenderung bersikap *favorable* terhadap perilaku tersebut; sebaliknya, semakin individu memiliki

evaluasi negatif maka individu akan cenderung bersikap *unfavorable* terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 2005).

2.1.3. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Ajzen (2005) mengatakan norma subjektif merupakan fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut *normative belief*, yaitu *belief* mengenai kesetujuan dan atau ketidaksetujuan yang berasal dari *referent* atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (*significant others*) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya terhadap suatu perilaku. Norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Norma subjektif ditentukan oleh kombinasi antara *normative belief* individu dan *motivation to comply*.

2.1.4. *Perceived Behavior Control*

Ajzen (2005) menjelaskan *perceived behavioral control* sebagai fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *control beliefs*, yaitu *belief* individu mengenai ada atau tidak adanya faktor yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan sebuah perilaku. *Belief* ini didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga oleh berbagai faktor lain yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka lebih besar kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan begitu juga sebaliknya.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya

(Pangestu dan Rusmana; 2012). Berikut ini ciri-ciri kepatuhan wajib pajak Sarang Burung Walet yang patuh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD atas kegiatan usaha pengambilan sarang burung walet dalam wilayah Kabupaten.
2. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang sendiri dengan menggunakan SPTPD.
3. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4. Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak lunas sekaligus dimuka untuk setiap masa pajak.

2.3. Pajak Sarang Burung Walet

Siahaan (2013: 520) menyatakan pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.3.1. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) objek pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Selanjutnya tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan bukan pajak (PNBP). Kemudian pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengenai subjek pajak dan wajib pajak menyatakan bahwa Subjek pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

2.3.2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet berbunyi, “Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.” Kemudian pada pasal 2 ayat (1) berbunyi, “Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual sarang burung walet.”

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk dapat memahami suatu fenomena berdasarkan pada pengalaman dari informan dalam memaknai suatu fenomena (Moleong, 2011: 6).

Fokus penelitian ini adalah Ketidapatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet dalam perspektif *Theory of Plan Behavior* yang dijabarkan menjadi tiga faktor sesuai dengan *Theory of Plan Behavior*, yaitu:

1. Sikap. Sikap atau tanggapan warga Desa Babulu Laut dengan adanya peraturan daerah tentang pajak atas penjualan sarang burung walet
2. Norma Subjektif. Kondisi sosial yang mempengaruhi warga desa Desa Babulu Laut dalam membayar pajak sarang burung walet.
3. *Percieved Behavior Control*. Dengan diterapkan sanksi oleh pemerintah akan mendukung atau menghalangi warga membayar pajak.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh peneliti dari informan melalui proses wawancara dan data sekunder yang terdiri atas literatur-literatur yang berada dalam lingkup perpajakan dan akuntansi keperilakuan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran literatur yang relevan dan wawancara mendalam. Selanjutnya Djaelani, (2013) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam sebaiknya digunakan wawancara terbuka sebab peneliti dapat secara leluasa untuk menggali data selengkap dan sedalam mungkin sehingga peneliti akan memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri. Ketika proses wawancara juga digunakan alat perekam.

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber yaitu menghubungkan informasi dari semua informan dan juga triangulasi Teknik yaitu mencari relevansi dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kedua metode triangulasi untuk menjamin keabsahan data yang akan ditindaklanjuti dalam proses analisis.

3.3 Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengusaha dan pengepul sarang burung walet, dan pengelola desa pada Desa Babulu Laut Kabupaten Panajam Paser Utara. Kemudian dalam menentukan subjek penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Seperti dijelaskan diatas dalam penelitian ini terdapat tiga subjek yaitu pemilik atau pengusaha dan pengepul sarang burung walet dan pemerintah desa. Akan tetapi kriteria yang akan dijabarkan hanya dari sisi pemilik atau pengusaha sarang burung walet saja dikarenakan pengepul yang terdapat di desa Babulu Laut hanya satu orang dan untuk pemerintah desa yang di wawancarai pun satu orang. Berikut merupakan kriteria dalam penentuan subjek pemilik atau pengusaha sarang burung walet:

1. Merupakan pemilik atau pengusaha sarang burung walet,
2. Telah menjalankan usaha sarang burung walet dalam rentang tahun 2011 hingga sekarang, dan
3. Telah melakukan panen sarang burung walet.

Untuk jumlah subjek yang akan diwawancarai sebanyak empat informan. Berikut data informan pada tabel 3.1:

Tabel 3. Data Informan

No.	Inisial Nama	Profesi	Keterangan
1.	Bapak D	Pengepul	Mulai menjadi pengepul pada tahun 2007
2.	Bapak R	Pemilik/Pengusaha	• Mulai memiliki bangunan sarang burung walet tahun 2012 • Panen sarang burung walet bangunan pertama dalam jangka waktu 1 bulan setelah pembangunan. • Panen sarang burung walet bangunan kedua dalam jangka waktu 5 bulan setelah pembangunan. • Panen sarang burung walet bangunan ketiga dalam jangka waktu 1 tahun setelah

			pembangunan.
3.	Bapak AF	Pemilik/Pengusaha	• Mulai memiliki bangunan sarang burung walet tahun 2014 • Panen sarang burung walet dalam jangka waktu 1 bulan setelah pembangunan.
4.	Bapak N	Pemilik/Pengusaha	• Mulai memiliki bangunan sarang burung walet tahun 2011 • Panen sarang burung walet bangunan pertama dalam jangka waktu 6 bulan setelah pembangunan. • Panen sarang burung walet bangunan kedua di 1 tahun.

Sumber : Data Lapangan (diolah)

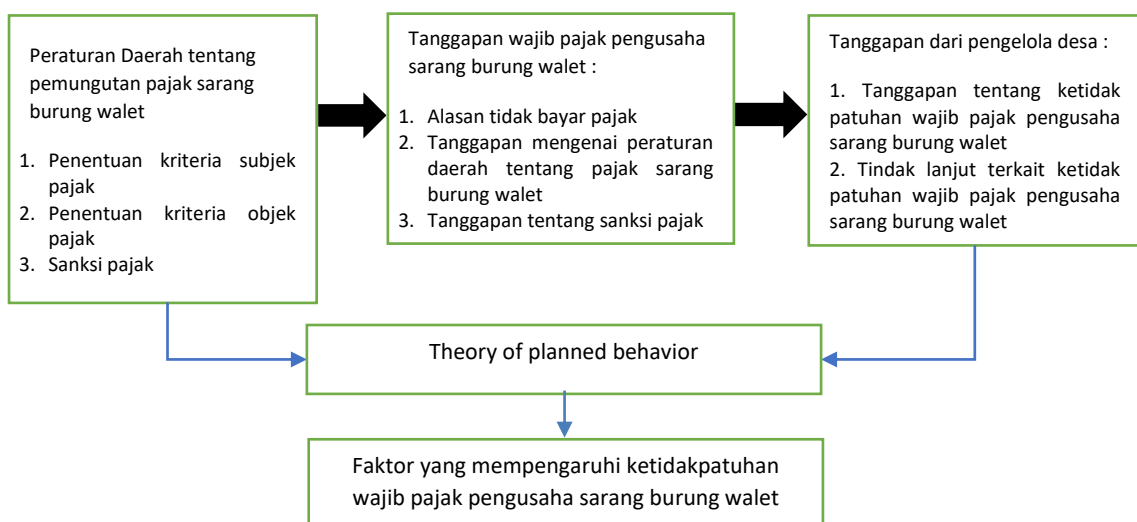
3.4 Teknik Analisis Data

Teknik atau metode analisis data adalah bagian dari proses penelitian dalam mengorganisir data yang telah dikumpulkan untuk diolah sehingga memperoleh suatu temuan atas masalah atau fokus penelitian yang ingin dijawab. Penelitian ini akan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dalam tahapan analisis data. Pada dasarnya, analisis tematik adalah mengidentifikasi, menganalisis, mengorganisir, menjelaskan, dan melaporkan tema/pola yang ditemukan dalam satu set data kualitatif (Clarke & Braun, 2013).

3.5 Kerangka Pikir Penelitian

Setelah pemaparan latar belakang, tujuan sampai dengan metode penelitian pada bagian sebelumnya, berikut disajikan kerangka pikir yang akan memberikan gambaran bagaimana penelitian akan dilaksanakan.

Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penelitian



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Sarang burung walet merupakan investasi menjanjikan karena harga jualnya yang hampir mencapai puluhan juta. Dengan alasan harga jual yang tinggi, pemerintah kemudian membuat aturan tentang pajak sarang burung walet. Pemerintah daerah yakin jika diterapkannya pajak ini akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti pada kabupaten Penajam Paser Utara yang telah menerapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2011 pasal (1) ayat (10) menyatakan pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Tetapi pada realisasinya ternyata pajak sarang burung walet tidak menyumbang lebih banyak pendapatan daerah dikarenakan nilai pajak yang sangat besar dan dilakukan setiap bulan. Bahkan ada desa yang semua warganya tidak membayar pajak yaitu Desa Babulu Laut. Dalam penelitian ini, ada enam informan yang diwawancarai yaitu bapak D (Pengepul), bapak R (Pemilik), bapak AF (Pemilik), bapak N (Pemilik), Abang A (Pemilik), dan Bapak W (Pemilik).

Berdasarkan hasil wawancara kepada keenam informan dapat diketahui mengapa warga desa Babulu Laut tidak ada yang membayar pajak sarang burung walet dengan menggunakan persepektif Theory of Planned Behavior. Dalam model TPB Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku taat atau tidak. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah sikap (attitude), yaitu suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Kedua adalah norma subjektif (subjective norm) yang didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Tekanan sosial berasal dari keluarga, teman, lingkungan sekitar dan lain-lain. Ketiga adalah perceived behavior control yaitu persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu (Ajzen, 2005) seperti penerapan sanksi pada warga yang tidak membayar pajak. Hasil wawancara di bawah ini menggambarkan bahwa keempat narasumber memiliki

alasan yang sama untuk tidak membayar pajak sarang burung walet melalui perspektif Theory of Planned Behavior.

4.1.1 Sikap (*Attitude*)

Niat untuk berperilaku tidak patuh melalui analisis *Theory of Planned Behavior* dilihat dari sikap yaitu suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Dalam faktor ini, menjabarkan tanggapan mereka mengenai peraturan pajak sarang burung walet.

“Tanggapannya setuju aja dengan adanya peraturan pajak sarang burung walet, asal pembayarannya dilakukan setahun sekali seperti pajak motor karena enggak setiap bulan kita panen sarang burung walet.” (R, Pengusaha)

“Terima aja asal pajak sarang burung walet dijadikan seperti pajak motor yang bayarnya cuma setahun sekali.” (AF, Pengusaha)

“Terima aja dengan adanya peraturan ini, tapi kami berharap ada feedback dari pemerintah kepada pemilik sarang burung walet seperti bantuan bahan-bahan untuk bangun sarang burung walet karena untuk bangun satu sarang burung walet yang sederhana itu juga butuh budget yang banyak” (D, Pengepul)

Dari faktor sikap, sebenarnya warga desa Babulu Laut menerima adanya pajak sarang burung walet ini. Akan tetapi, peraturan pajak mewajibkan pemilik atau pengusaha sarang burung walet membayar pajak setiap bulannya dengan nilai pajak sepuluh persen dan ini sangat memberatkan para pemilik atau pengusaha sarang burung walet dikarenakan tidak setiap bulan mereka panen. Kemudian juga mereka berharap adanya *feedback* dari pemerintah atas berlakunya peraturan daerah ini seperti bantuan penyediaan bahan-bahan bangunan.

Temuan lainnya terkait jarak tempuh untuk penyetoran pajak dan tarif pajak yang kurang diterima oleh pemilik dan pengepul Sarang burung Walet.

“Tarif pajak yang mahal sama jarak yang jauh yang buat orang jadi enggak mau bayar pajak.” (N, Pengusaha)

“Tarif sama jarak pastinya. Karena pajak yang dipungut itu kan terlalu besar 10 persen dan nantinya bakal mengurangi keuntungan kita. Untuk jarak ya sekitar 1 jam dari Babulu Laut ke kantor Pajak, kalau bolak-balik ya jadi 2 jam.” (W, Pengusaha)

“Tarif pajak yang mahal, kalau untuk jarak tidak masalah.” (A, Pengusaha)

Dari faktor sikap individu, motif mereka tidak membayar pajak adalah karena tarif pajak dan jarak yang harus ditempuh untuk membayar pajak. Tarif yang diberlakukan pajak sarang burung walet ialah sebesar sepuluh persen. Hal ini dirasa memberatkan bagi pengusaha sarang burung walet karena keuntungan mereka tidak menutupi sementara biaya operasional dan perawatan juga tinggi sehingga pajak menjadi beban bagi mereka. Selain itu, untuk membayar pajak, diperlukan satu jam perjalanan dari desa Babulu Laut ke Badan Keuangan Daerah. Faktor ini menyebabkan niat wajib pajak untuk tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.1.2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Niat untuk berperilaku tidak patuh melalui analisis *Theory of Planned Behavior* dilihat dari norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Tekanan sosial biasanya berasal dari teman, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Hasil wawancara menunjukkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh perkumpulan pengusaha sarang burung walet. Adanya lembaga yang secara dibentuk untuk menjadi forum komunikasi dan meningkatkan kemampuan bersaing para pengusaha belum dapat menjembatani kepentingan negara dengan para pengusaha. Berikut pernyataan dari informan.

“Lah wong pemerintah ga pernah dengerin kita kok!? Kita melalui forum pengusaha sarang walet udah protes terkait tarif tapi tidak ditanggapi, jadi buat apa bayar pajak?”. ” (N, Pengusaha)

“Keluhan kami sama, yaitu masalah tarif pajak yang terlalu tinggi. Oleh karena itu kami sepakat untuk tidak membayar pajak apapun kepada pemerintah daerah..” (AF, Pengusaha)

Dari tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa perilaku ketidakpatuhan yang mereka tunjukkan dipengaruhi oleh forum perkumpulan pengusaha walet dimana menurut keputusan dalam forum tersebut bahwa mereka keberatan terkait tarif yang ditetapkan. Sikap pemerintah daerah yang tidak ada tanggapan terkait hal tersebut menimbulkan kekecewaan dan ketidakpatuhan para wajib pajak

pengusaha sarang burung walet. Menurut mereka, pemerintah saja tidak mau mendengarkan pendapat mereka jadi buat apa mereka mengikuti aturan. Padahal kalau pemerintah menerima pendapat mereka, kemungkinan niat mereka untuk bayar pajak akan semakin besar.

4.1.3. *Percieved Behavior Control*

Niat untuk berperilaku tidak patuh melalui analisis *Theory of Planned Behavior* dilihat dari *Percieved Behavior Control* yaitu persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu (Ajzen, 2005) seperti penerapan sanksi pada warga yang tidak membayar pajak. Pada wawancara kami bertanya kepada semua informan tanggapan mereka terkait sanksi yang diterapkan pada pajak sarang burung walet.

“Kalau mau diterapkan sanksi enggak masalah karena badan keuangan juga enggak mau dengerin pendapat kita pada saat forum. Padahal di forum itu kita sudah bilang terkait nilai pajak sama sistem pembayarannya tetapi mereka tidak sepakat dan tetap kekeh untuk sahkan peraturan ini.” (D, Pengepul)

“Tergantung dari sanksi pajak sendiri. Tapi biarpun ditagih kami enggak takut karena kami juga punya perkumpulan sarang burung walet.” (N, Pengusaha)

“Nggak ada pengaruh diterapkan sanksi karena nggak bayar pun kita nggak takut karena punya perkumpulan sarang burung walet.” (AF, Pengusaha)

Dari tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa para pengusaha di desa Babulu Laut telah paham akan sanksi jika tidak patuh bayar pajak namun mereka terkesan cuek karena mereka dilindungi oleh forum/ perkumpulan mereka. Seharusnya pemerintah daerah dapat membangun komunikasi dengan perkumpulan/forum pengusaha walet sehingga menciptakan hubungan yang kondusif antara pemerintah dan pengusaha. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dalam hal ini perangkat desa dan pemerintah kabupaten Panajam Paser Utara perlu dibangun agar dapat meningkatkan niat wajib pajak pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak.

4.2 Model Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan pajak burung walet merupakan penghasilan asli daerah di Babulu Laut. Sehingga diperlukan model dan mekanisme pemungutan pajak Sarang Burung Walet untuk menunjang pemasukan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang membuat warga mau membayar pajak. Berdasarkan penelitian (Kuswandi et al., 2020), penarikan pajak sarang burung walet memerlukan agen-agen pajak di pemerintah daerah sebagai *controlling sytem*. Sistem pengontrolan tersebut bisa diberikan sebagai peringatan dan edukasi kepada masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak atas kepemilikan usaha sarang burung walet. Pada daerah Babulu Laut, para pengusaha pajak sarang burung walet enggan membayar pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat dikarenakan tarif yang sangat tinggi. Berikut pernyataan Bapak N dan Bapak R:

“Kenapa sangat tinggi tarif yang harus dibayarkan..Kami belum mengerti tentang pentingnya pajak terhadap usaha kami ini.” (N, Pengusaha)

“ hmm..Sudah tarif tinggi..Banyak kendala yang kami hadapi seperti jarak yang sangat jauh untuk membayar pajak.. seharusnya kami diberikan ilmu tentang pajak.” (R, Pengusaha)

Berdasarkan pernyataan N dan R diatas, bisa dilihat bahwa kurangnya pemahaman informan tentang pajak. Sehingga diperlukannya edukasi dari pemerintah setempat tentang fungsi pajak terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini bisa dilakukan oleh bagian edukasi yang berada di instansi pemerintah daerah tersebut. Beberapa pernyataan dari Informan A dan W:

“Kami masih membutuhkan ilmu tentang pajak itu sendiri, apa itu pajak, kenapa pajak itu penting bagi daerah, selama ini mungkin perlu pemahaman dulu..sehingga kami bisa membayar pajak” (A, Pengusaha)

Dengan demikian diperlukannya edukasi terhadap pajak, agar warga sadar bagaimana pentingnya pajak bagi daerah mereka. Sehingga muncul niat untuk patuh membayar pajak sarang burung walet.

4.3 Peran Sanksi Pajak

Sanksi pajak sangat penting dalam menunjang proses pemungutan pajak. Sanksi pajak sangat mendukung peran pajak dalam meningkatkan kepatuhan

pajak secara sukarela (Coder, 2012). Dalam hal ini masih banyak pemilik usaha sarang burung walet tidak mau membayar pajak. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh informan A dan informan W:

“Saya tidak tertarik dengan pembayaran pajak...hmm...tinggi segala tarifnya, tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan”
(A, Pengusaha)

“Tarifnya 10% kalau tidak salah...tinggi banget kan..membuat kami pusing memikirkan bagaimana membayarnya” (W, Pengusaha)

Tarif yang terlalu tinggi membuat para pengusaha sarang burung walet enggan membayar pajak. Sehingga bisa berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pemerintah. Secara tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap anggaran pemerintah desa. Berikut pernyataan informan F yang merupakan sekretaris desa:

“Jika sedikit pemasukan pajak yang diterima dari para pemilik usaha burung walet, biasanya akan berpengaruh terhadap pemasukan kami, sehingga juga akan berpengaruh juga kepada anggaran kami” (F, Sekretaris Desa)

Penerimaan pajak yang banyak akan berpengaruh terhadap pendapatan desa. Sehingga juga akan mempengaruhi anggaran yang akan diterima desa. Dengan demikian pemerintah setempat perlu mereview kembali terkait kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet agar para wajib pajak pengusaha sarang burung walet mendapatkan kepastian hukum serta memperoleh keadilan dalam penerapan pajak atas usaha yang mereka lakukan.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi warga desa Babulu Laut tidak membayar pajak yang dijabarkan melalui perspektif *Theory of Planned Behavior*. Pertama adalah sikap (*attitude*), yaitu suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Dalam hal ini warga desa Babulu Laut menerima adanya peraturan pajak sarang burung walet ini, akan tetapi di sisi lain mereka juga mengatakan mereka akan membayar kalau tarif pajaknya diturunkan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dalam membayar pajak adalah jarak yang jauh dan tarif pajak yang mahal.

Kedua adalah norma subjektif (*subjective norm*) yang didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Tekanan sosial berasal dari keluarga, teman, lingkungan sekitar dan lain-lain. Faktor kesepakatan di dalam perkumpulan sarang burung walet menjadi alasan untuk tidak patuh dimana mereka juga memiliki pandangan yang sama terhadap pemerintah yang tidak menanggapi keluhan mereka tentang tarif pajak sarang burung walet.

Ketiga adalah *perceived behavior control* yaitu persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu seperti penerapan sanksi pada warga yang tidak membayar pajak. Bagi pemilik sarang walet, sanksi tidak berpengaruh apa-apa dikarenakan pemerintah tidak memberikan *feedback* bagi pemilik sarang burung walet dan mereka belum memahami terkait pentingnya membayar pajak.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang cukup jauh, biaya, dan akses transportasi yang sulit. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan ialah perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuat sebuah model

pemungutan pajak yang dapat diterima oleh pengusaha pajak walet sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50, 179-211.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior (2nd edition)*. Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education.
- Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara. (2018). *Wajib Pajak dan Realisasi Anggaran Pajak Sarang Burung Walet*. Penajam Paser Utara
- Clarke, V., & Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. *The Psychologist*, 26(2), 120–133.
- Coder, J. (2012). Achieving Meaningful Civil Tax Penalty Reform and Making It Stick. *Akron Tax Journal*, 27.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, XX(1), 82–92.
- Hidayat, W & Nugroho, A.A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 12 No. 2.
- Kuswandi, H., Myrna, R., & Karlina, N. (2020). Swallow Nest Tax Control in Cirebon Regency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 03(2), 73–129.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung, Indonesia: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pangestu, F. & Rusmana, O. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin Juni 2012*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. (2011). Peraturan Daerah Nomor 3.
- Rahayu S.K. (2013). *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: ALFABETA.

- Syakura, M. A., & Ginting, L. (2017). Perilaku Wajib Pajak terhadap Niat Menggunakan E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak dengan Profesi sebagai Dosen). *Akuntabel*. 14(1), 46–56.
- Syakura, M. A., Khairin, F. N., Ginting, Y. L., Kusumawardani, A., & Fitria, Y. (2016). A Behavioral Study On Voluntary Compliance Of E-Commerce Tax. *4th Asian Academic Society International Conference (AASIC) 2016*. 433–442.

LAMPIRAN 1

Luaran Penelitian



The Mulawarman International Conference on Economics and Business (MICEB)

Jl. Tanah Grogot No. 1 Kampus Unmul Gunung Kelua Samarinda city, Kalimantan Timur, Indonesia Fax : (0541) 738916 Phone : (0541) 738916, 738915, 738913, Email : dekan@feb.unmul.ac.id

SAMARINDA, 23 Oktober 2021

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear, Muhammad Abadan Syakura Article ID Paper00039 We are pleased to inform you that your paper **“Swallow Nest Tax Collection in The Theory of Planned Behavior Perspective”** has been accepted to be presented in the MICEB conference. If you require any further information, please do not hesitate to contact the Indonesian Committee of MICEB via email miceb@feb.unmul.ac.id We look forward to seeing you at the conference.

Regards, Conference Chair

Dr. Herning Indriastuti, SE., MM

SWALLOW NEST TAX COLLECTION IN THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR PERSPECTIVE

Yoremia Lestari Ginting, Muhammad Abadan Syakura*, Dwi Risma Deviyanti,
Yunita Fitria, Mega Norsita, Eka Febriani, Fibriyani Nur Khairin

Accounting Department, Mulawarman University, Indonesia

***Corresponding author email:**

muhammad.abadan.syakura@feb.unmul.ac.id

ABSTRACT

One of the local taxes in Penajam Paser Utara Regency is considered as the swallow nest tax, which is a potential regional tax contributor as the selling price of swallow nest per kilogram reaches tens of millions. However, the actualization of the tax revenue did not reach the planned budget target because most villages in this area do not pay taxes. This study discusses the cause of the non-compliance taxpayers of the swallow nest tax. Further, this research utilizes the Theory of Planned Behavior perspective conducted with qualitative approach. This research was conducted in Babulu Laut village in Penajam Paser Utara involving the owners and the tax collectors of swallow nest s as the informants. The results of this study indicated that the taxpayers' incompliance was due to several reasons, including: high tax rate, agreement among association members, and enforcement from local government. In sum, this study illustrates the importance of incorporating the behavior of taxpayers' comprising beliefs, attitudes, and norms in achieving optimum taxpayers' compliance.

Keywords: Qualitative research; Swallow Nest Tax; Taxpayers' Compliance; Theory of Planned Behavior

INTRODUCTION

Taxes have long been regarded as the largest revenue contributor in Indonesia. Swallow nest Tax refers to the tax on the activities of swallowing and/or exploitation of swallow nest, which has considerable potential due to the potential market share in the international world, as a case in Indonesia being the largest exporter of swallow nest s to China with a global market share of 75%

worldwide. According to the classification of tax collection agencies, taxes are divided into two types, including: central and local tax. Central tax refers to the tax managed by the Central Government through the Directorate General of Taxes (DGT) and its following vertical units. Meanwhile, local tax refers to the tax managed by local governments to fund the regional expenditures and infrastructure development. Penajam Paser utara Utara Regency as an autonomous region has implemented local tax, such as the swallow nest tax Under the Penajam Paser utara Utara Regency Regional Regulation Number. 3 of 2011.

The district government considers that the profits generated from the swallow nest tax have been significant. However, from 2014 to 2019, the actualization of tax revenue from this sector did not match the budget target, as illustrated in Table 1 depicting Taxpayers, Budget Targets and Actualization of swallow nest tax budget in Penajam Paser Utara Regency.

Table 1. Taxpayer's Budget Target and Budget Actualization of Swallow nest tax in Penajam Paser Utara Regency

Number	Year	Taxpayer of Swallow nest in PPU	Budgeting Target	Budgeting Actualization
1.	2014	10 taxpayers	IDR. 30.000.000,00	IDR18.125.000,00
2.	2015	20 taxpayers	IDR 75.000.000,00	IDR 37.058.010,00
3.	2016	33 taxpayers	IDR 50.000.000,00	IDR 54.977.378,00
4.	2017	25 taxpayers	IDR 50.000.000,00	IDR 54.176.500,00
5.	2018	26 taxpayers	IDR 50.000.000,00	IDR 80.370.000,00
6.	2019	23 taxpayers	IDR 98.500.000,00	IDR 95.461.000,00

Source: collected data, 2021

Table 1 describes the number of swallow nest taxpayers for Penajam Paser Utara Regency which has fluctuated from year to year. In terms of actualization, swallow nest tax revenues have increased despite the decreasing number of taxpayers due to the taxpayer incompliance regardless the income from the

swallow nest. However, of all registered taxpayers, there are several villages that do not report the swallow nest tax, such as Babulu Laut which is located in the Babulu sub-district, adjacent to the village of Babulu Darat, demonstrating swallow nest buildings alongside of the village road. Based on data from the Babulu Laut village office, there are 219 swallow nest owners which do not comply with their tax obligations as swallow nest entrepreneurs.

The aforementioned problem thus deals with the taxpayer compliance. According to Rahayu, 2013 taxpayer compliance is defined as a condition where the taxpayer fulfills all tax obligations and exercise his or her tax rights. Hence, this study analyzes the compliance of the swallow nest taxpayer from the perspective of the Theory of Planned Behavior (TPB). Ajzen, 1991 explained that taxpayer compliance behavior is influenced by the intention to behave obediently or not. The intention to behave is influenced by the three factors. The first factor is attitude, referring to a disposition to respond positively or negatively to the behavior (Ajzen, 2005). The second factor is subjective norm which relate to the individual's perception of social pressure to perform the behavior. The third factor is Perceived Behavior Control or belief control refers to an individual's belief in matters that support or hinder behavior and in the perception of the strength level of belief affecting certain behavior.

Similarly, Hidayat & Nugroho, 2010 reported that taxpayer compliance is influenced by the intention to use e-filing and the intention to use e-filing is influenced by tax knowledge and taxpayer satisfaction. Such finding was also found in another study of Syakura & Ginting (2017). In addition, taxpayer compliance is influenced indirectly by tax knowledge and taxpayer satisfaction through the intention to use e-filing.

Furthermore, Syakura, Khairin, Ginting, Kusumawardani, & Fitria (2016) explains that individual behavior is influenced by attitudes towards behavioral factors such as the lack of tax morals and the fairness of the tax system, which is in accordance with the TPB model. The next findings state the subjective norm factors such as the influence of the social environment around the taxpayer (person or tax system). Furthermore, the last factor is perceived behavioral control factors, such as low tax audits and weak tax oversight authorities. Thus, based on the background and the results of previous studies, the researchers of this study intend to explore the collection of swallow nest taxes in the perspective of TPB (Theory of Planned Behavior).

Through a qualitative approach, this study aims to explore the problem of non-compliance of swallow nest taxpayers in Babulu Laut village in the perspective of Theory of Planned Behavior. This research is further expected to contribute both theoretically and practically. Theoretically, this research is expected for a scientific contribution to the Theory of Planned Behavior on the taxation aspect. Meanwhile in practical discourse, this research is expected to provide an actual overview of the field through the analysis presented by the concerned parties in the swallow nest business. Furthermore, this study is expected to be a reference material for the government in making policies.

REVIEW OF LITERATURE

The Theory of Planned Behavior

The Theory of Planned Behavior (TPB) is defined as a social psychology model, dominantly applied to predict individual behavior. The analytical tool used in this research is TPB developed by Ajzen (1991) as a refinement of the reason

action theory proposed by Fishbein and Ajzen. The main focus of the Theory of Planned behavior is in accordance with the theory of reason action, referring to the individual's intention to perform certain behaviors. However, in TPB, Ajzen added one factor that determines the intention, which was the perceived behavioral control, involving an individual's perception of the possessed control in relation to certain behaviors (Ajzen, 2005).

Based on Ajzen's TPB model (1991), it is explained that taxpayer compliance behavior is influenced by the intention to behave obediently or not. Intention to behave is influenced by the three factors, which are: attitude, related to a disposition to respond positively or negatively to a behavior, in this case is the villagers of Babulu Laut negative response to the swallow nest tax regulation; subjective norm, which is defined as an individual's perception of social pressure to perform or not to perform a behavior (Ajzen, 2005) generated from family, friends, the surrounding environment (in Babulu Laut village, where the residents do not pay the swallow nest tax; perceived behavior control, referring to the individual's perception of the possessed control in relation to certain behaviors (Ajzen, 2005) such as the enforcement of sanctions to citizens who do not pay taxes. Hence, the results of the three aforementioned factors conclude the intention of the villagers of Babulu Laut for not complying with tax payment, thereby creating disobedient behavior.

Local Taxes and Taxpayer Compliance

The issue of compliance in the field of taxation has become a matter of concern. Compliance in terms of taxation refers to the condition of taxpayers in exercising their rights, and in particular their obligations, in a disciplined manner in accordance with applicable tax regulations (Ramadania, Andriyanto, & Sari,

2021). The following are the characteristics of compliance with swallow nest taxpayers who comply with the Regional Regulation of Penajam Paser Utara Regency Number 3 of 2011, stipulating that: (1) every taxpayer is obliged to fill out an SPTPD for the business activities of conducting swallow nest within the Regency area; (2) taxpayers calculate and determine their own tax payable by using the SPTPD; (3) SPTPD must be submitted to the Regent or to the appointed officials within 20 (twenty) days after the end of the tax period; and (4) every taxpayer is obliged to fully pay taxes in advance for each tax period.

As stated in the previous section, the swallow nest tax is part of the regional tax, indicating mandatory contributions made by individuals or entities to the region without a balanced direct reward, imposed based on the applicable laws and regulations to finance the local government administrators (Mardiasmo, 2013). Furthermore, (Siahaan, 2016) states that swallow nest tax refers to a tax on the activities of taking and or exploiting swallow nest, in which a swallow is an animal belonging to the *Collocalia* genus, of *Collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, and *Collocalia linchi*. Swallow nest tax is a type of Regency/City tax that has just been established based on (Ministry of Finance Republic of Indonesia, 2009).

Then if based on the Regional Regulation of Penajam Paser utara Regency Number 3 of 2011 article 3 paragraph (1) and paragraph (2) it reads "The object of the tax is the collection and/or exploitation of Swallow nest. Furthermore, the tax object as referred to in paragraph (1) is not included in the collection of Swallow nest which has been subject to non-tax revenue (PNBP). Then in Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) regarding tax subjects and taxpayers, it reads "The tax subject of Swallow nest is an individual or entity that collects and/or

manages swallow nest tax. Meanwhile, the Taxpayer involves an individual or entities that collects and/or manages swallow nest tax.”

The basis for the imposition of taxes is regulated according to the Regional Regulation of Penajam Paser Utara Regency Number 3 of 2011 article 5 paragraphs (1) and (2) concerning the basis for the imposition of the Swallow nest tax which reads, "The basis for the imposition of Swallow nest tax is the selling value of swallow nest referred to in paragraph (1) and calculated based on the multiplication of the general market price of swallow nest in the area concerned with the volume of swallow nest". Then article 2 paragraph (1) reads, that "The tax rate is regulated at 10% (ten percent) of the selling value of swallow nest."

RESEARCH METHODOLOGY

This study applies a qualitative method (Lexy J. Moleong, 2011: 6), in a special natural context by utilizing various natural methods. The focus of this research is the non-compliance of the swallow nest taxpayer in the perspective of Theory of Planned Behavior translated into the three factors according to the Theory of Planned Behavior, including:

- 1) Attitude, refers to attitude or response of the residents of Babulu Laut Village to the local regulation regarding the swallow nest tax
- 2) Subjective Norms, refers to social conditions that affect the villagers of Babulu Laut Village in paying taxes.
- 3) Perceived Behavior Control, refers to sanctions imposed by the government to prevent citizens from not paying taxes.

In addition, this study applies the source triangulation method, connecting information from all informants and technical triangulation, navigating the

relevance from observations, interviews, and documentation. The two methods of triangulation are utilized to ensure the validity of the data to be followed up in the analysis process.

This research also performs the thematic analysis in the data analysis stage by identifying, analyzing, organizing, explaining, and reporting themes/patterns found in a qualitative data set (Clarke, V., & Braun, 2013). As previously explained in this study, there were three subjects, including owners or entrepreneurs and collectors of swallow nest tax and the village government. However, the criteria that will be described are restrictedly generated from the side of the owner or entrepreneur of the swallow nest, because there is only one collector in Babulu Laut village and only one person is interviewed for the village government. The following Table 3. presents the informants involved in this study, including:

Table 3. The Informants

No.	Initials	Occupation	Information
1.	Mr. D	Collector of swallow nest s	Initiated as a collector in 2007
2.	Mr. R	Owner or entrepreneur	- owning a swallow nest building in 2012 - harvesting the first building swallow nest within 1 month after construction. - harvesting the second building swallow nest within 5 months after construction. - harvesting the third building's swallow nest within 1 year after construction.
3.	Mr. AF	Owner or entrepreneur	- owning a swallow nest building in 2014 - harvesting the first building swallow nest within 1 month after construction.

4.	Mr. N	Owner or entrepreneur	- owning a swallow nest building in 2011 - harvesting the first building swallow nest within 1 month after construction. - harvesting the second building swallow nest 1 year.
5	Mr. A	Owner or entrepreneur	- owning a swallow nest building in 2018 - owning one building - harvesting swallow nest for two times.
6	Mr. W	Owner or entrepreneur	- owning a swallow nest building in 2016 - owning one building - harvesting swallow nest for two times .
7	Mr. F	Village government	-

RESULT AND DISCUSSION

Swallow nest is considered a promising investment due to the high selling price reaching almost tens of millions. Hence, the government stipulated a regulation regarding the swallow nest tax. This notion is based on the government belief that the implementation of this tax will increase Regional Original Income (PAD), as in Penajam Paser Utara district which has implemented Regional Regulation Number. 3 of 2011. The Regional Regulation of Penajam Paser Utara Regency Number. 3 of 2011, Article (1) paragraph (10) stipulates that the swallow nest tax comprises a tax on the activities of performing and or exploiting swallow nest. However, the swallow nest entrepreneurs do not pay the tax does, which do not contribute to regional income due to the high tax value, carried out monthly. There is even a village where all of its residents do not pay taxes, such as in Babulu Laut village. This study involves the six informants who were

interviewed, including Mr. D (Seller), Mr. R (Owner), Mr. AF (Owner), Mr. A (Owner), and Mr. N (Owner).

Based on the results of interviews with the six informants, the researchers navigated that the Babulu Laut residents do not pay the swallow nest tax by implementing the Theory of Planned Behavior (TPB) perspective. Ajzen's (1991) TPB model explained that taxpayer compliance behavior is influenced by the intention to behave obediently or not. Intention to behave is influenced by three factors, including: attitude, which is a disposition to respond positively or negatively to a behavior; subjective norm, which is defined as an individual's perception of social pressure to perform or not to perform a behavior (Ajzen, 2005), generated from family, friends, the surrounding environment and others; and perceived behavior control, involving the individual's perception of the possessed control in relation to certain behaviors (Ajzen, 2005) such as the enforcement of sanctions to citizens who do not pay taxes. The results of the interview illustrate that the four informants presented similar reasons for not paying the swallow nest tax through the perspective of Theory of Planned Behavior.

Attitude Factors in Planned Behavior

The intention to behave disobediently through the analysis of the Theory of Planned Behavior is perceived from the attitude, involving a disposition to respond positively or negatively to a behavior. In this case, the interviewees or informants described their response regarding the swallow nest tax regulation.

"The response is that they agree with the regulation on the swallow nest tax, as long as the payment is made once a year alike in a motorcycle tax, because we don't harvest swallow nest every month." (R, Owner)

"Well, I just accept it as long as the swallow nest tax is just like motorcycle tax that only pays once a year." (AF, Owner)

"I just accept this regulation, but we hope that there will be feedback from the government to the owners of swallow nest, such as the assistance of materials to build a swallow nest, as building a simple swallow nest also requires a lot of budget" (D, Collector)

From the attitude factor, the Babulu Laut residents agree with complying with the swallow nest tax. However, the tax regulations require the swallow nest owners or entrepreneurs to pay a tax every month with a tax value of ten percent, thereby serving as burdensome for swallow nest owners or entrepreneurs as they do not harvest every month. Further, the informants also expected the feedback from the government on the enactment of this regional regulation, such as assistance in providing building materials.

Other findings related to mileage for tax deposit and tax rate that are less accepted by swallow nest owners and collectors.

"The high tax rates and the long distances make people don't want to pay taxes." (N, Owner)

"The tax rates and also the distance, for sure are the cause, because the collected tax is too high. It is 10 percent and it will reduce our profits later. For the distance, it is about 1 hour from Babulu Laut to the Tax office, if you go back and forth, it takes 2 hours." (R, Owner)

"For me, the tax rate is too high, but regarding the distance, it doesn't matter." (AF, Owner)

From subjective norm factors, their motives for not paying taxes include the tax rates and distance. The rate imposed by the swallow nest tax is ten percent. In addition, it takes an hour drive from Babulu Laut village to the Regional Finance Agency to merely pay the tax; thereby leading to the taxpayers' disobedience in complying with their tax obligations.

Subjective Norm in Incompliance Behavior

The intention to behave disobediently through the analysis of Theory of Planned Behavior is perceived from the subjective norm, defined as the individual's perception of social pressure to perform or not perform a behavior (Ajzen, 2005). Social pressure is typically generated from friends, family, and the environment.

The results of the interview indicated that the non-compliant attitude in fulfilling tax obligations is strongly influenced by the association of swallow nest entrepreneurs. The existence of an institution, that was formed as a communication forum, expected to improve the competitiveness of entrepreneurs, has not been able to bridge the interests of the state with the entrepreneurs. The following is a statement from the informant.

"The government here never listens to us! Our nest association already do protest about the tax rates, because its too high, but never get respons either feedback from them, so why do we must pays taxes?." (N, Owner)

"Our complaints remains the same, it is about the high tax rates. That is why (we) as the part of swallow nest association agreed to never pay any taxes to the local government." (AF, Owner)

From these responses, it is apparent that the non-compliance behavior is influenced by the swallow business association forum where according to the decision in the forum that they object to the tax rates. The negligent attitude of the local government, providing no response regarding this matter, further generates the disappointment and disobedience to the taxpayers of swallow nest entrepreneurs. According to the informants, the government was unwilling to listen to their opinions; thereby resulting in their disobedience. In fact, if the government listens to their opinion, it is likelihood that their intention to pay taxes will be even greater.

The Perceived Behavior Control

The intention to behave disobediently through the analysis of Theory of Planned Behavior is comprehended from Perceived Behavior Control, including the individual's perception of the possessed control in relation to certain behaviors (Ajzen, 2005), such as the enforcement of sanctions to citizens who do not pay taxes. In the interview, the informants were asked about their responses regarding the enforced sanctions applied to the swallow nest taxpayers.

"If you want to apply sanctions, there is no problem because financial institutions also don't want to listen to our opinions at the forum. Even though at the forum we said that the tax value and the payment system were related, but they didn't agree and were still reluctant to ratify this regulation." (D, Collector)

"It depends on the tax sanctions themselves. But even if we are billed, we are not afraid because we also have a swallow nest association." (N, Owner)

"There is no effect on applying sanctions because we don't pay, we are not afraid because we have a swallow nest association." (AF, Owner)

From this response, it is apparent that the entrepreneurs in Babulu Laut village have understood the sanctions if they do not comply with paying taxes, but they seem consistent because they are protected by their forum/association. Thus, local governments are encouraged to establish good communication with swallow entrepreneurs' associations/forums to create a supporting relationship between the government and entrepreneurs. The trust of taxpayers towards the tax authorities, in this case the village apparatus and Panajam Paser Utara Regency government, needs to be exercised in order to increase the intention of taxpayers from swallow nest entrepreneurs to pay taxes.

The tax rate that are too high further generates the swallow nest entrepreneurs to reluctantly pay the taxes, indirectly affecting the local

government revenue and the village government budget. The following is the statement of informant F serving as the village secretary:

"If a small amount of tax revenue is received from the swallow nest business owners, it will usually affect our income, so it will also affect our budget" (F, Village Secretary)

In general, tax revenue affects the village income; thereby affecting the budget received by the village. Thus, the local government is encouraged to review the policy in collecting swallow nest tax, from which the swallow nest taxpayers, such as entrepreneurs could obtain legal certainty and justice in the application of taxes for their business.

CONCLUSION

The results of this study reveal several factors generating Babulu Laut village resident to not pay taxes as described through the perspective of Theory of Planned Behavior. The first factor is attitude, which is a disposition to respond positively or negatively to a behavior. In this case, Babulu Laut village resident accept the swallow nest tax regulation, despite stating that they will pay if the tax rate is lowered. Other findings indicate that the problems faced by taxpayers include long distances and expensive tax rates. The second factor includes subjective norm, which is defined as an individual's perception of social pressure to perform or not to perform a behavior (Ajzen, 2005), generated from family, friends, the surrounding environment and others. The agreement factor in the swallow nest association serves as a reason for disobedience. The third factor is perceived behavior control, involving the individual's perception of the possessed control in relation to certain behaviors (Ajzen, 2005) such as the enforcement of sanctions to citizens who do not pay taxes. From the interviews, said it was

mentioned that the sanctions had no effect because the government did not provide feedback for swallow nest owners.

Furthermore, this study has limitations providing potential consideration for future researchers. The limitations of this study include the distant research location, the high cost, and the difficult transportation access. The suggestion based on the mentioned limitations includes the need for further research to create a tax collection model accepted by swallow tax entrepreneurs has affecting the implications for taxpayer awareness.

Acknowledgement

The authors would like to express their gratitude to The Faculty of Economics and Business Accounting Department for the financial support and also for the Swallow Nest Association for the unconditional assistance upon the completion of this paper.

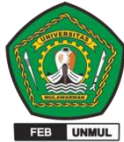
REFERENCES

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior The Theory of Planned Behavior*. 5978(August). [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2005). Attides, Personallity and Behavior. *International Journal of Strategic Innovative Marketing*, Vol. 3, pp. 117–191.
- Clarke, V., & Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. *The Psychologist*, 26(2), 120–133. Retrieved from [http://eprints.uwe.ac.uk/21155/3/Teaching thematic analysis Research Repository version.pdf](http://eprints.uwe.ac.uk/21155/3/Teaching%20thematic%20analysis%20Research%20Repository%20version.pdf)
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82–93. <https://doi.org/10.1097/00042737-200205000-00005>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. . *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. , (2009).
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Penajam Paser Utara Regency Regional Regulation No. 3 of 2011. , 2000 § (2020).
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*.

- Yogyakarta: Indonesia: Graha Ilmu.
- Ramadania, E., Andriyanto, W. A., & Sari, R. H. D. P. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi. Volume 2, 2020, 2*, 744–761.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Syakura, M. A. (2017). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Niat Menggunakan E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Dengan Profesi Sebagai Dosen). *Akuntabel*, 14(1), 46. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1343>
- Syakura, M. A., Khairin, F. N., Ginting, Y. L., Kusumawardani, A., & Fitria, Y. (2016). a Behavioral Study on Voluntary Compliance of E-Commerce Tax. *4th Asian Academic Society International Conference (AASIC)*, 433–442.

LAMPIRAN 2

Lembar Penilaian Proposal



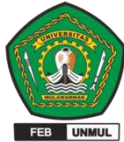
HASIL REVIEW

Judul Proposal:
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR
Kekuatan:
1. Biasanya riset perpajakan lemah dalam kerangka teori. Penelitian ini menggunakan TPB dan ini adalah kerangka yang cocok. Selain itu masalah penelitian sudah tepat. 2. Perspektif yang diberikan menjanjikan temuan yang unik
Kelemahan:
1. Dalam latar belakang informasi sudah sejauh mana penggunaan TPB dalam riset perpajakan. 2. Dalam bab kajian literatur belum dibahas sejauh mana kekuatan dan keterbatasan TPB terutama jika akan digunakan di riset perpajakan. 3. Dalam bab metode penelitian belum ada bgmn triangulasi akan dilakukan.
Saran:
1. Dalam latar belakang sebutkan bagaimana penggunaan TPB dalam riset perpajakan, apakah sudah populer atau belum? Mengapa pemilih menggunakannya? Apa keunikan riset ini dibanding riset2 perpajakan sebelumnya. 2. Dalam bab kajian literatur perlu dibahas sejauh mana kekuatan dan keterbatasan TPB terutama jika akan digunakan di riset perpajakan. 3. Dalam bab metode penelitian, untuk analisis data jelaskan bgmn triangulasi akan dilakukan.

Surabaya, 13 Oktober 2021

Reviewer

Prof. Drs.ec. Sujoko Efferin M.Com(Hons)., M.A., Ph.D



HASIL REVIEW

Judul Proposal:
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR
Kekuatan:
1. Topiknya menarik. Tema yang diangkat didasarkan pada kondisi riil yang ada di masyarakat. Dibahas dengan menggunakan teori keperilakuan.
Kelemahan:
1. Pendahuluan belum berkaitan dengan topik. 2. Bab 2 belum jelas, telaah teori nya dikaitkan dengan fenomena. Apa saja yg menjadi faktor pemicu niat (intensi) tidak patuh belum dijelaskan. 3. Luaran belum diupgrade.
Saran:
1. Luaran ke international journal 2. Pendahuluan perlu menambahkan potensi dari pajak sarang burung walet. Termasuk menjelaskan kondisi bahwa selama ini pelaku industri sarang burung walet tidak patuh pajak

Reviewer

TTD

Dr. Sekar Mayangsari, Ak., CA.

LAMPIRAN 3

Lembar Penilaian Hasil Penelitian



LEMBAR PENILAIAN
HASIL PENELITIAN JURUSAN AKUNTANSI FEB UNMUL 2020/2021

Judul Penelitian : Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam Perspektif Theory of Planned Behavior

Ketua Peneliti : Yoremia Lestari br.Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CA., CSRS

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor	Nilai bobot x skor
1	Potensi tercapainya luaran: a. Temuan baru (teori, metode, model, kebijakan) b. Publikasi terindeks SINTA 2 atau Jurnal internasional bereputasi	20%	6	1,2
2	Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, orisinalitas/kebaruan penelitian, kemutakhiran rujukan, dan metode penelitian.	30%	8	2,4
3	Kesesuaian hasil penelitian dengan usulan	20%	7	1,4
4	Potensi keberlanjutan hasil penelitian	25%	8	2
5	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	5%	7	0,35
Nilai Total				7,35

Komentar Penilai:

Riset yang menarik dan berpotensi memberikan insight yang baru. Namun ada beberapa catatan jika ingin dipublikasikan di Sinta1 atau 2:

1. Dalam latar belakang sebutkan bagaimana penggunaan TPB dalam riset perpajakan, apakah sudah populer atau belum? Mengapa pemilih menggunakannya? Apa keunikan riset ini dibanding riset2 perpajakan sebelumnya
2. Dalam bab kajian literatur perlu dibahas sejauh mana kekuatan dan keterbatasan TPB terutama jika akan digunakan di riset perpajakan.
3. Dalam bab metode penelitian, untuk analisis data jelaskan bgmn triangulasi dilakukan.
4. Pemaknaan temuan dalam pembahasan perlu diperdalam dengan menggunakan TPB sebagai rujukan.
5. Dalam bab konklusi, peneliti perlu menunjukkan sejauh mana temuan yang diperoleh mampu membawa pemahaman baru dalam fenomena perpajakan? apa bedanya hasil studi ini dgn studi-studi sebelumnya tentang perpajakan



(pemungutan pajak)? pemahaman baru apa yang ditawarkan? Apa keterbatasan penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya?

Surabaya, 13 Oktober 2021

Reviewer/Pembahas,

**Prof. Drs.ec. Sujoko Efferin M.Com(Hons),
M.A., Ph.D**



LEMBAR PENILAIAN
HASIL PENELITIAN JURUSAN AKUNTANSI FEB UNMUL 2020/2021

Judul Penelitian : Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam Perspektif Theory of Planned Behavior

Ketua Peneliti : Yoremia Lestari br.Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CA., CSRS

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor	Nilai bobot x skor
1	Potensi tercapainya luaran: a. Temuan baru (teori, metode, model, kebijakan) b. Publikasi terindeks SINTA 2 atau Jurnal internasional bereputasi	20%	70	
2	Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, orisinalitas/kebaruan penelitian, kemutakhiran rujukan, dan metode penelitian.	30%	70	
3	Kesesuaian hasil penelitian dengan usulan	20%	50	
4	Potensi keberlanjutan hasil penelitian	25%	60	
5	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	5%	-	
Nilai Total				

Komentar Penilai:

Topik menarik. Laporan penelitian belum sesuai dengan topik. Gambar 3.1. diperbaiki kerangkanya, yang dituliskan faktor yang mempengaruhi faktor yang tidak patuh wajib pajak. Bab 4 harusnya dimulai dengan deskripsi tentang informan. Hasil wawancara dilanjutkan dengan pembahasan. Implikasi ditambahkan untuk kebijakan/regulasi.

Jakarta, Oktober 2021

Reviewer/Pembahas,

Dr. Sekar Mayangsari, Ak., CA.

LAMPIRAN 4

Kontrak Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541)738913-738915-738916
Laman feb.unmul.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN
Penelitian Kelompok Jurusan Akuntansi
Tahun Anggaran 2021
Nomor: 003/JUR-AKT/X/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SYARIFAH HUDAYAH** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Tanah Grogot 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **YOREMIA LESTARI BR. GINTING** : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikat diri dalam suatu Kontrak Penelitian Kelompok Jurusan Akuntansi Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Jurusan Akuntansi Tahun Anggaran 2021 dengan judul **“PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR”**

**Pasal 2
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541)738913-738915-738916
Laman feb.unmul.ac.id

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana penelitian dalam bentuk insentif ekstra penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan Pembayaran sebesar Rp20.000.000 (**Dua Puluh Juta Rupiah**) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan luaran wajib penelitian yang diserahkan kepada Jurusan Akuntansi.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 1 April 2021** dan berakhir pada **Tanggal 30 September 2021**

Pasal 5

Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa artikel yang dipublikasikan pada Jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 2 atau Jurnal Bereputasi Internasional.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Akhir Penelitian dengan judul **“PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR”**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541)738913-738915-738916
Laman feb.unmul.ac.id

- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** bukti submit artikel luaran penelitian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Laporan Hasil Penelitian ke Jurusan Akuntansi paling lambat **9 September 2021**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempresentasikan hasil penelitian pada Seminar Hasil Penelitian Jurusan Akuntansi pada tanggal **15 September 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Laporan Akhir paling lambat **30 September 2021**.
- (4) Laporan Akhir sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap pelaksanaan Penelitian Tahun anggaran 2021.

Pasal 9

Penilaian Rancangan Penelitian dan Hasil Penelitian

Penilaian rancangan penelitian dan hasil penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksanaan dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksanaan dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119

Telepon (0541)738913-738915-738916

Laman feb.unmul.ac.id

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, tidak mempresentasikan hasil penelitiannya, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan pembayaran.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119

Telepon (0541)738913-738915-738916

Laman feb.unmul.ac.id

apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si
NIP 196205131988112001

PIHAK KEDUA

Yoremia Lestari br.Ginting, S.E., M.Ak., Ak
NIP 198502212014042001